REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.

Anonim. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.05/2017 Tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Benadahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara*. Jakarta.

Anonim. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana*. Jakarta.

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

Amir Ahmari dan Syamsul Amar. 2013. *Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Mentawai: Jurnal Keuangan.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.

Berry L.M, and J.P. Houton. 1993. *Psychology at Work*. England: Wm. C. Brown, Communication, England Oxford Inc.

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 2011. *Pengembangan Kualitas SDM Pengelola Kuangan Negara Melalui Program Percepatan Akuntanbilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP): Bagian Intergal dalam Implementasi Reformasi Manajemen Keuangan Negara.*

Hariandja, M. T. E. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Grasindo.

Herriyanto, Hendris. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Angggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hidayat, Taufik. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial*. Jurnal Akuntabilitas Vol. VII No.1 Hlm. 56-68. Jakarta: Universitas Trisakti.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

repository.unsimar.ac.id